



STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM Mendukung PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

POLICY STRATEGY FOR DEVELOPING RELIGIOUS EDUCATION IN SUPPORTING BORDER AREA DEVELOPMENT IN NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Naskah disubmit: 23 September 2024 | Revisi: 14 Oktober 2024 | diterima: 3 Desember 2024

Arie Nova R.*

Kanror Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan
Utara

*Penulis Korespondensi:
arianova34@gmail.com

Abstrak

Policy Paper ini menguraikan bahwa wilayah perbatasan di Kalimantan Utara memiliki karakteristik unik, baik dari segi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Pendidikan agama di wilayah ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung pembangunan daerah. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan, seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta pengaruh budaya luar. Karena itu, pendidikan agama dapat menjadi katalisator dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing. Tulisan ini menganalisis kontribusi pendidikan agama terhadap pembangunan wilayah perbatasan serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat memperkuat peran pendidikan agama dalam mencapai tujuan pembangunan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi fenomena sosial yang ada di kawasan perbatasan, dengan pendekatan analisis-deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisis data secara detail dan mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan agama yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Apalagi pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena kedekatannya, terdapat interaksi dan aktivitas lintas batas yang signifikan di antara masyarakat yang tinggal di kawasan ini, khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Sehingga peran pendidikan agama menjadi signifikansi yang strategis dalam pembentukan karakter dan wajah masyarakat yang ada di kawasan antarnegara ini.

Kata Kunci: Pembangunan, Pendidikan Agama, Karakter, Wilayah Perbatasan, Nilai Kebangsaan

Abstract

This Policy Paper describes that the border areas in North Kalimantan have unique characteristics, in terms of geography, society, culture, and economy. Religious education in this area has a very important role in shaping the character of the community, strengthening national values, and supporting regional development. However, there are several challenges faced in the development of religious education in border areas, such as limited access to educational facilities, lack of qualified teachers, and the influence of foreign cultures. Therefore, religious education can be a catalyst in building a harmonious, tolerant, and competitive society. This paper analyzes the contribution of religious education to the development of border areas and formulates policy strategies that can strengthen the role of religious education in achieving development goals. This article uses a qualitative method that focuses on understanding the meaning and interpretation of social phenomena in border areas, with a descriptive-analytical approach to describe and analyze data in detail and in-depth. The results show that quality religious education can improve the quality of human resources, strengthen national values, and support regional economic development. Moreover, the management of the border area in North Kalimantan which directly borders Malaysia. Due to its proximity, there is significant cross-border interaction and activity among the people living in this area, especially the people in Malinau and Nunukan Regencies. So the role of religious education becomes a strategic significance in the formation of character and the face of the people in this inter-country region.

Keywords: Development, Religious Education, Character, Border Areas, National Values

PENDAHULUAN

Pada umumnya, daerah perbatasan memiliki ciri khas yang berbeda dari wilayah lainnya, terutama dalam hal keberagaman budaya dan lingkungan hidup. Kegiatan perdagangan lintas batas, migrasi penduduk, serta adanya ancaman keamanan dan ketahanan nasional juga sering terjadi di daerah perbatasan. Dalam beberapa kasus, daerah perbatasan juga mengalami kurangnya akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, seperti: pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengembangkan daerah perbatasan agar dapat terhubung secara efektif dengan wilayah lainnya serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Sebagai sebuah entitas geografis, Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berbatasan dengan beberapa provinsi di Indonesia maupun negara tetangga. Berikut adalah beberapa kondisi dan situasi perbatasan Kalimantan Utara:

1. Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan. Kondisi perbatasan ini cukup baik, terdapat beberapa jalur transportasi seperti jalan raya dan sungai yang memudahkan aksesibilitas antar kedua wilayah.
2. Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat. Kondisi perbatasan ini juga cukup baik, terdapat beberapa jalur transportasi seperti jalan raya dan sungai yang memudahkan aksesibilitas antar kedua wilayah.
3. Berbatasan dengan Provinsi Sabah, Malaysia di sebelah utara. Kondisi perbatasan ini cukup rawan, terutama di daerah perbatasan pedalaman yang sulit diakses. Namun, pemerintah Indone-

sia dan Malaysia terus berupaya untuk memperkuat keamanan dan kerja sama di daerah perbatasan ini.

4. Berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah timur. Kondisi perbatasan laut ini cukup penting, terutama untuk aktivitas pelayaran dan perdagangan antar wilayah di Kalimantan Utara dan wilayah-wilayah lain di Indonesia maupun negara tetangga.

Secara keseluruhan, situasi dan kondisi perbatasan Kalimantan Utara cukup baik, namun terdapat beberapa tantangan seperti pengamanan perbatasan dengan negara tetangga dan aksesibilitas ke daerah perbatasan yang sulit. Namun, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat infrastruktur dan keamanan di daerah perbatasan tersebut.

Perbatasan merupakan daerah yang secara geografis terletak pada batas wilayah suatu negara atau wilayah administratif yang berbatasan dengan negara tetangga. Perbatasan memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, perbatasan juga memiliki tantangan dan masalah khusus yang perlu diatasi seperti masalah keamanan, aksesibilitas yang terbatas, dan perbedaan budaya dan bahasa antara wilayah yang berbatasan. Oleh karena itu, Bappenas mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang terfokus pada pengembangan daerah perbatasan, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah, penguatan keamanan, dan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah perbatasan. Dalam hal ini, perbatasan dianggap sebagai wilayah yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan dan pemba-

ngunan nasional yang lebih merata (Bappenas, 2010:63).

Posisi geografis ini menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah strategis tetapi juga rentan terhadap berbagai tantangan, seperti: perbedaan budaya, ideologi, dan potensi konflik lintas batas. Selain itu, juga memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pendidikan agama dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas kebangsaan dan menjaga keutuhan wilayah melalui nilai-nilai keagamaan yang toleran dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan agama yang baik dapat menjadi alat untuk memperkuat rasa cinta tanah air, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat multietnis dan multireligius di Kalimantan Utara. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang harmonis.

Sebagai daerah pemekaran, Provinsi Kalimantan Utara berdasar UU No. 20 Tahun 2012 yang memisahkan wilayah Kalimantan Timur menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut, serta mempermudah pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kalimantan Utara. Dalam UU ini diatur mengenai batas-batas wilayah, tata cara pembentukan, pemerintahan, dan peralihan kewenangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang hak-hak masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah Kalimantan Utara. UU tersebut antara lain berbunyi: “Bahwa untuk men-

dorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Provinsi Kalimantan Utara.”

Wilayah perbatasan di Kalimantan Utara ini memiliki karakteristik unik, yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan berbagai sektor, termasuk pendidikan agama. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pentingnya pengembangan pendidikan agama di wilayah ini adalah:

1. Keragaman budaya dan agama:
 - a. Wilayah perbatasan Kalimantan Utara memiliki keberagaman budaya dan agama yang tinggi. Hal ini menuntut pendidikan agama yang inklusif dan mampu menghargai perbedaan yang ada.
 - b. Keberagaman ini juga membawa potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik, sehingga pendidikan

- agama yang baik dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
2. Akses terbatas terhadap pendidikan, karena letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau membuat akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk pendidikan agama, menjadi terbatas. Selain itu, karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah dan guru yang berkualitas, juga menjadi kendala.
 3. Pengaruh budaya luar, hal ini membawa pengaruh yang kuat, termasuk nilai-nilai dan praktik keagamaan yang berbeda. Sehingga adanya pengaruh budaya luar yang ekstrem dapat memicu munculnya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
 4. Peran pendidikan agama dalam pembangunan:
 - a. Pendidikan agama berperan penting dalam membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan memiliki jiwa nasionalisme.
 - b. Pendidikan agama yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.
 - c. Pendidikan agama yang moderat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap paham-paham radikal dan intoleransi.
 5. Mandat NKRI dan pemerintah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 amanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di bidang agama.
 - b. Pengembangan pendidikan agama sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- Dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan, pendidikan agama memiliki peran strategis, yaitu:
1. Pendidikan agama dapat memperkuat rasa cinta Tanah Air dan kebangsaan.
 2. Pendidikan agama dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembentukan karakter yang baik dan peningkatan pengetahuan.
 3. Pendidikan agama dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga mencegah terjadinya konflik sosial.
 4. Sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan melalui pendidikan agama, akan menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah.
- Dengan demikian, pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara merupakan upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi Masalah

Pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara menghadapi sejumlah tantangan dan kompleksitas yang membutuhkan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, identifikasi masalah kebijakan pengembangan pendidikan agama dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara di antaranya:

1. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan
 - Fasilitas pendidikan agama, seperti madrasah, pondok pesantren, dan sekolah berbasis agama tidak memadai di wilayah perbatasan.
 - Dampaknya anak-anak di perbatasan kesulitan mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas, yang memengaruhi pembentukan nilai moral dan etika mereka.
2. Kurangnya tenaga pendidik yang kompeten
 - Keterbatasan jumlah dan kualitas guru agama di wilayah perbatasan. Banyak guru enggan ditugaskan di daerah terpencil karena minimnya insentif dan fasilitas.
 - Dampaknya: proses pembelajaran agama menjadi kurang efektif, dan pendidikan agama tidak berkembang dengan baik.
3. Kesenjangan dalam kurikulum pendidikan agama
 - Kurikulum pendidikan agama yang digunakan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, yang memiliki tantangan dan konteks sosial-budaya yang unik.
 - Dampaknya: pendidikan agama kurang kontekstual dan tidak mampu membekali siswa dengan nilai-nilai yang relevan untuk menghadapi tantangan lokal dan global.
4. Minimnya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran
 - Alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan masih terbatas. Kebijakan pengembangan pendidikan agama sering kali kurang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan wilayah.
5. Pengaruh budaya dan ideologi asing
 - Posisi strategis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia meningkatkan potensi pengaruh budaya dan ideologi asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasional.
 - Dampaknya: pendidikan agama yang lemah dapat membuat masyarakat di perbatasan lebih rentan terhadap pengaruh tersebut.
6. Kurangnya kerja sama lintas sektor
 - Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat lokal dalam mengembangkan pendidikan agama belum optimal.
 - Dampaknya: upaya pengembangan pendidikan agama menjadi kurang terarah dan tidak efektif.
7. Tantangan multikulturalisme dan kerukunan antarumat beragama
 - Kalimantan Utara memiliki masyarakat yang multietnis dan multireligius, yang memerlukan pendekatan pendidikan agama yang inklusif dan toleran.
 - Dampaknya: ketegangan sosial dapat muncul jika pendidikan agama tidak mendukung harmoni dan toleransi.
8. Kurangnya pemanfaatan teknologi
 - Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan agama, seperti *e-learning* atau aplikasi pendidikan berbasis agama, masih minim di wilayah perbatasan.
 - Dampaknya: siswa di wilayah perbatasan tertinggal dalam penguasaan

teknologi dan akses ke sumber belajar yang lebih luas.

9. Keterbatasan partisipasi masyarakat
 - Keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung dan memantau pendidikan agama masih rendah.
 - Dampaknya: program pendidikan agama sering kali kurang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
10. Kurangnya monitoring dan evaluasi program
 - Program dan kebijakan terkait pendidikan agama di wilayah perbatasan sering kali kurang terpantau dan dievaluasi keberhasilannya.
 - Dampaknya: kebijakan yang kurang efektif terus berlanjut tanpa perbaikan yang signifikan.

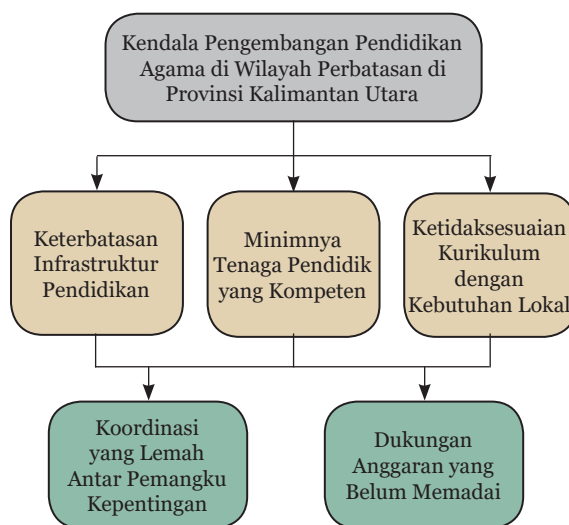
Identifikasi masalah di atas menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Kebijakan tersebut harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah yang telah diidentifikasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka problem statement terkait kebijakan Kementerian Agama mengembangkan sistem pendidikan agama di wilayah perbatasan antarnegara yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mendukung pembangunan karakter dan integritas bangsa di wilayah perbatasan belum berjalan efektif dan optimal antara *output* dengan hasil yang hendak dicapai, karena faktor keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang

kompeten, ketidakselarasan kurikulum dengan kearifan lokal, serta minimnya dukungan kebijakan dan anggaran.

Hal ini dapat digambarkan dalam akar masalah berikut ini:



Pertama, akses terhadap fasilitas pendidikan, seperti sekolah agama dan madrasah, masih terbatas di wilayah perbatasan yang memiliki medan geografis sulit dijangkau.

Kedua, kurangnya guru agama yang memenuhi kualifikasi dan bersedia mengabdikan diri di daerah perbatasan menghambat penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Ketiga, kurikulum pendidikan agama sering kali kurang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

Keempat, alokasi dana untuk program pendidikan agama di wilayah perbatasan sering kali belum memadai, sehingga program-program yang direncanakan sulit direalisasikan.

Kelima, kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan agama masih belum optimal.

Tujuan dan Manfaat

Penulisan artikel kebijakan dengan fokus pada pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara memiliki sejumlah tujuan dan manfaat yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis.

Tujuan Kebijakan

1. Mengidentifikasi secara komprehensif masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampaknya.
2. Menawarkan solusi atau strategi yang konkret dan relevan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Menyumbangkan pengetahuan baru dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pendidikan agama di wilayah perbatasan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program dan kegiatan pengembangan pendidikan agama.

Manfaat Kebijakan

1. Artikel ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama di wilayah perbatasan melalui perumusan kebijakan yang tepat.
2. Pendidikan agama yang berkualitas dapat memperkuat nilai-nilai toleransi, moderasi, dan kerukunan antar umat beragama.
3. Pendidikan agama yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, kompeten-

si, dan siap menghadapi tantangan global.

4. Pendidikan agama yang berkualitas dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.
5. Artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan.
6. Artikel ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama dan peran serta mereka dalam mendukung pengembangannya.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual yang kuat akan menjadi landasan bagi penulisan artikel kebijakan yang efektif. Berikut beberapa kerangka yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

Kerangka Teoritis

Teori modal sosial menawarkan perspektif yang sangat relevan dalam memahami dinamika sosial dan budaya di wilayah perbatasan, khususnya dalam konteks pengembangan pendidikan agama. Konsep ini menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai bersama dalam memfasilitasi kerja sama dan tindakan kolektif.

Berikut beberapa cara konkret dalam menerapkan teori modal sosial dalam penulisan artikel kebijakan:

1. Analisis jaringan sosial, yaitu:
 - a. Identifikasi jaringan sosial yang ada di masyarakat perbatasan, terma-

- suk hubungan antar individu, kelompok, dan institusi.
 - b. Analisis kekuatan dan kelemahan jaringan sosial dalam mendukung pengembangan pendidikan agama.
 - c. Identifikasi jenis-jenis modal sosial yang ada, seperti ikatan (*bonding*), jembatan (*bridging*), dan menjembatani (*linking*).
2. Peran tokoh agama dan masyarakat:
 - a. Menekankan peran tokoh agama sebagai agen perubahan dan pembawa pesan positif.
 - b. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan agama.
 - c. Memberdayakan masyarakat untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam pengembangan pendidikan agama.
 3. Penguatan nilai-nilai bersama:
 - a. Mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang relevan dengan pendidikan agama dan memanfaatkannya sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum.
 - b. Menanamkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan saling menghormati antar umat beragama.
 - c. Membudayakan semangat gotong royong dalam masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agama.
 4. Membangun kepercayaan:
 - a. Menjamin transparansi dalam pengelolaan dana dan program pendidikan agama.
 - b. Menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
 - c. Menjamin keadilan dalam distribusi manfaat dari program pendidikan agama.
 5. Kemitraan strategis:
 - a. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran.
 - b. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal dalam mengembangkan program pendidikan agama.
 - c. Menjalani kerja sama dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya lainnya.

Kerangka Konseptual

1. Pendidikan agama tidak hanya sebatas pemahaman doktrin, tetapi juga meliputi pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan hidup.
2. Pembangunan wilayah perbatasan melibatkan berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Setiap wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang unik, sehingga perlu memperhatikan konteks lokal dalam merancang strategi pengembangan pendidikan agama.
4. Kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan pengembangan pendidikan agama yang berkelanjutan.
5. Pendidikan agama sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat dan memperkuat kohesi sosial.

6. Modal sosial yang kuat di masyarakat dapat mempermudah implementasi kebijakan pengembangan pendidikan agama.
7. Teori belajar dapat digunakan untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dan efektif.
8. Konteks lokal perlu dipertimbangkan dalam merancang program dan kegiatan pengembangan pendidikan agama.

METODOLOGI

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002: 51). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2015: 49).

Analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2005: 4). Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara

Beberapa daerah di perbatasan Indonesia memiliki masyarakat yang memiliki kesa-

maan budaya dan warisan nenek moyang yang sama, sehingga kerap terdapat hubungan kekerabatan yang erat antar masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun, terdapat juga wilayah perbatasan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, masyarakat di perbatasan Indonesia tetap menjalin interaksi sosial dan kegiatan ekonomi dengan warga negara tetangga. Namun, terdapat kendala-kendala seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengembangan wilayah perbatasan. Selain itu, wilayah perbatasan juga terbatas dalam sarana dan prasarana serta lokasi yang terisolasi sehingga sulit dijangkau.

Pembangunan diartikan sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Tujuan utama pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2022-2024 disebutkan bahwa penyebaran madrasah masih terfokus pada beberapa provinsi saja, sehingga layanan pendidikan madrasah belum bisa menjangkau wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di perkebunan sawit milik pengusaha Malaysia di perbatasan, sehingga anak-anak mereka bersekolah di Indonesia, khususnya di Pulau Sebatik, yang saat ini diwakili oleh madrasah perbatasan dan pondok pesantren.

Kondisi kawasan perbatasan yang didiami oleh perkumpulan masyarakat adat dan suku yang dipisahkan oleh garis batas negara menyebabkan penerapan hukum yang

berbeda. Konsep dualisme terlebih lagi dalam penerapan hukum merupakan realitas yang ada di kawasan perbatasan. Posisi hukum nasional yang sejalan dengan hukum adat ternyata masih terdapat celah yang dimasuki oleh hukum negara lain yang tidak lain adalah negara tetangga. Adanya hukum pluralistik ini menyebabkan kurang harmonisnya tatanan hukum yang diterapkan di daerah perbatasan sehingga berdampak pada penerapan hukum yang adil dan kepastian hukum di daerah perbatasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dikotomi peraturan seringkali terjadi kontradiksi dan perbedaan penerapan hukum dari masing-masing pengaturan hukum tersebut, hal ini disebabkan oleh politik adat daerah perbatasan yang mencari kebenaran dalam penerapan hukum. hukum. Kedudukan hukum nasional belum menjamin adanya pengaturan hukum yang ada di daerah perbatasan karena hukum adat di daerah perbatasan memiliki kedudukan yang kuat dalam penerapan hukum dalam persekutuan hukum adatnya. Hukum nasional terasa sulit untuk menjadi landasan hukum di daerah perbatasan karena adanya hukum adat yang lebih kuat dalam pelaksanaannya.

Aktivitas Sosial Budaya Lintas Batas

Aktivitas lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan darat dapat mempengaruhi kondisi pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, sosial-budaya, dan infrastruktur. Dari segi pertahanan keamanan, aktivitas lintas batas dapat menimbulkan ancaman terhadap kerawanan tindak pidana karena adanya arus barang, jasa, dan orang dari dan ke negara Indonesia serta Malaysia, yang dapat terlihat dari perdagangan barang ilegal dengan volume yang melebihi kapasi-

tas. Selain itu, terdapat juga indikasi adanya jalur pelintasan batas ilegal yang sering dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian pelaku kejahatan atau jalur penyelundupan narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya.

Dari segi ekonomi dan perdagangan, di provinsi Kalimantan Utara terdapat kegiatan perdagangan tradisional di kawasan perbatasan darat yang melibatkan penjualan komoditas hasil pertanian dan perkebunan. Biasanya, produk-produk tersebut berupa bahan mentah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan suplai kebutuhan barang pokok dari negara tetangga Malaysia masih terjadi, seperti produk makanan dan minuman, gas, minyak goreng, susu bubuk, pupuk, dan onderdil mesin.

Dari perspektif sosial budaya, hubungan sosial dan budaya antara Indonesia dan Malaysia di kedua kawasan perbatasan terjalin dengan baik. Sebagian besar suku yang mendiami kawasan tersebut adalah suku Dayak dan suku Melayu yang merupakan satu rumpun. Hubungan sosial budaya antara penduduk di kedua wilayah telah terjalin sejak lama karena adanya ikatan sosial dan emosional antar penduduk di kawasan perbatasan. Interaksi sosial budaya antar masyarakat terjalin dalam berbagai bentuk, seperti perkawinan antar warga yang berbeda status kewarganegaraan dan hubungan kerja di lapangan. Keadaan ini didukung oleh kesamaan adat-istiadat dan penggunaan bahasa sehari-hari yang relatif serupa.

Dari sudut pandang sosial budaya, hubungan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara ditandai dengan interaksi sosial dan budaya yang kuat. Mayoritas penduduk di kawasan ter-

sebut adalah suku Dayak dan suku Melayu yang memiliki ikatan sosial dan emosional yang lama terjalin. Selain itu, ada juga hubungan antarwarga yang melintasi batas kewarganegaraan, seperti perkawinan dan hubungan kerja. Kesamaan adat dan penggunaan bahasa sehari-hari yang mirip juga memperkuat hubungan sosial budaya antara kedua wilayah.

Di wilayah tersebut terdapat berbagai Madrasah swasta yang menyediakan Pendidikan Keagamaan, seperti Madrasah Tapal Batas, Madrasah Al Khairat Sebatik, Madrasah Ibtidaiyah Swasta As'adiyah Sei Taiwan, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-As'adiyah Se Nyamuk, MI As'Adiyah Sungai Nyamuk, MA YIIPS Sebatik Barat, MTs As'Adiyah Sungai Nyamuk, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asmaul Husna DDI, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Haji Beddurahim. Namun, kurangnya Madrasah Negeri di wilayah tersebut masih menjadi masalah. Selain itu, kegiatan lintas batas juga berdampak pada kondisi infrastruktur di kawasan tersebut.

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memajukan wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti perdagangan internasional, pariwisata, dan pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang lebih baik dan modern agar dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperbaiki mobilitas barang dan orang. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di

wilayah perbatasan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, dapat membuka peluang investasi baru dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dengan kata lain, Investasi baru yang masuk ke wilayah perbatasan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja di daerah tersebut. Hal ini dapat membuka peluang bagi para investor untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dapat lebih baik, sehingga mempermudah mobilitas barang dan orang.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan adanya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang memadai, masyarakat dapat memperoleh akses lebih baik terhadap layanan publik dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini juga dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara merupakan sebuah investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, melalui peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.

Strategi Pendidikan Agama di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti perdagangan internasional, pariwisata, dan pertanian. Namun, wilayah ini masih mengalami kendala dalam pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan yang memadai. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah strategi pendidikan agama di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, namun kurangnya madrasah negeri di wilayah tersebut menjadi masalah dalam memberikan pendidikan agama yang memadai. Selain itu, kegiatan lintas batas juga berdampak pada kondisi infrastruktur di kawasan tersebut. Oleh karena itu, strategi pendidikan agama perlu dikembangkan secara optimal.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan agama di madrasah swasta yang sudah ada di wilayah perbatasan. Madrasah swasta seperti Madrasah Tapal Batas, Madrasah Al Khairat Sebatik, Madrasah Ibtidaiyah Swasta As'adiyah Sei Taiwan, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-As'adiyah Se Nyamuk, MI As'adiyah Sungai Nyamuk, MA YIIPS Sebatik Barat, MTs As'adiyah Sungai Nyamuk, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asmaul Husna DDI, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Haji Bedurahim perlu diberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama yang mereka berikan.

Selain itu, pemerintah perlu membangun madrasah negeri di wilayah perbatasan untuk memberikan akses pendidikan agama yang lebih baik dan merata. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk membangun

infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan memadai di wilayah perbatasan. Selain memperkuat pendidikan agama, strategi lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerja sama lintas batas dalam bidang pendidikan agama. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat melakukan kerja sama dalam pembangunan madrasah dan pengembangan kurikulum pendidikan agama di wilayah perbatasan.

Kerja sama dengan pihak swasta juga dapat dilakukan untuk memberikan akses pendidikan agama yang lebih baik di wilayah perbatasan. Pihak swasta dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana atau fasilitas untuk memperkuat pendidikan agama di wilayah perbatasan. Dengan memperkuat pendidikan agama di wilayah perbatasan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ikatan sosial dan budaya antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pembangunan wilayah perbatasan negara menjadi penting untuk memajukan wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS KEBIJAKAN

Dalam menganalisis kebijakan pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan antar-negara di Provinsi Kalimantan Utara, penulis menggunakan analisis SWOT, yaitu: *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threat* (ancaman), yaitu salah satu alat yang efektif untuk mengevaluasi situasi saat ini dan merumuskan strategi pengembangan yang lebih baik.

Dalam konteks pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, analisis SWOT dapat membantu

mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang ada sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan):

- Wilayah perbatasan seringkali kaya akan sumber daya alam. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan agama.
- Masyarakat perbatasan umumnya memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Hal ini dapat menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan pendidikan agama.
- Keberagaman budaya dapat memperkaya pembelajaran agama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.
- Masyarakat setempat seringkali memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan agama anak-anak mereka.

2. *Weaknesses* (kelemahan):

- Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh menjadi kendala utama dalam mengakses pendidikan agama.
- Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten dalam bidang agama.
- Fasilitas pendidikan agama yang ada seringkali kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.
- Kurikulum pendidikan agama yang ada belum sepenuhnya relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

3. *Opportunities* (peluang):

- Pemerintah daerah dan pusat dapat memberikan dukungan berupa kebijakan, anggaran, dan program-program khusus untuk pengembangan

pendidikan agama di wilayah perbatasan.

- Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama, misalnya melalui pembelajaran online atau pengembangan aplikasi pendidikan.
- Lembaga internasional dapat memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan.
- Wilayah perbatasan dengan kekayaan budaya dan agamanya dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata religi yang dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. *Threats* (ancaman):

- Masuknya budaya luar yang berbeda dapat mempengaruhi nilai-nilai agama dan mengancam keberlangsungan pendidikan agama.
- Adanya potensi masuknya paham-paham radikal yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
- Wilayah perbatasan seringkali rawan bencana alam yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.
- Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi program-program pengembangan pendidikan agama.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, di antaranya:

1. Mengembangkan program pembelajaran online, menyediakan akses internet, dan memanfaatkan media sosial untuk

- memperluas jangkauan pendidikan agama.
2. Melakukan pelatihan guru secara berkala, memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, dan meningkatkan kesejahteraan guru.
3. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal, mengakomodasi keberagaman budaya, dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari.
4. Membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyinergikan upaya pengembangan pendidikan agama.
5. Meningkatkan literasi keagamaan masyarakat, mempromosikan nilai-nilai toleransi, dan membangun dialog antar umat beragama.

6. Mengembangkan potensi wisata religi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung pengembangan pendidikan agama.

Dengan menerapkan strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT, diharapkan pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan dengan menggunakan teori SWOT di atas, penulis mengajukan beberapa alternatif kebijakan kepada Menteri Agama sebagai acuan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai berikut:

TABEL KRITERIA ALTERNATIF KEBIJAKAN (SKOR 1 – 10)
BERDASARKAN TEORI WILLIAM N. DUNN

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)										Skor Total
	Efektivi- tas	Efisi- ensi	Kela- yakan	Keles- tarian	Keadil- an	Kela- yakan Politik	Kecu- kupan	Pemera- taan	Respon- sivitas	Kete- patan	
ALTERNATIF 1											
Menteri Agama membuat regulasi penguatan infrastruktur dan akses pendidikan agama melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan akses internet yang terjangkau dan subsidi transportasi bagi siswa dan guru.	9	8	9	8	9	7	-	-	-	-	50
ACUAN REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN 1 BERDASARKAN TEORI WILLIAM N. DUNN											
<p>1. Efektivitas: Kebijakan ini berpotensi sangat efektif dalam meningkatkan akses pendidikan agama. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan akses internet, dan subsidi transportasi secara langsung mengatasi hambatan-hambatan fisik dan ekonomi yang seringkali dialami siswa dan guru di daerah terpencil. Skor: 9</p> <p>2. Efisiensi: Efisiensi kebijakan ini sangat tergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Jika program ini dirancang dengan baik dan tidak terjadi korupsi, maka bisa menjadi efisien. Namun, jika tidak, biaya yang dikeluarkan bisa membengkak dan tidak memberikan hasil yang optimal. Skor: 8</p> <p>3. Kelayakan: Kebijakan ini secara umum layak, karena sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses terhadap layanan publik. Skor: 9</p> <p>4. Kelestarian: Kebijakan ini berpotensi berkelanjutan jika diiringi dengan program pemeliharaan yang baik dan pendanaan yang cukup. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Skor: 8</p> <p>5. Keadilan: Kebijakan ini secara umum adil, terutama bagi siswa dan guru di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan agama. Namun, perlu dipastikan bahwa distribusi sumber daya dilakukan secara merata dan tidak ada diskriminasi. Skor: 9</p> <p>6. Kelayakan Politik: Kelayakan politik kebijakan ini tergantung pada dukungan politik yang ada. Jika didukung oleh mayoritas anggota parlemen dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, maka kebijakan ini memiliki peluang besar untuk diimplementasikan. Skor: 7</p>											

SOLUSI PENYELESAIAN PROBLEM STATEMENT											
Rekomendasi Menteri Agama untuk memperkuat infrastruktur dan akses pendidikan agama melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan akses internet yang terjangkau, dan subsidi transportasi bagi siswa dan guru merupakan kebijakan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan.											
Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)										Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Kelayakan	Kelestarian	Keadilan	Kelayakan Politik	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	
ALTERNATIF 2											
Menteri Agama membuat regulasi penyeleksian guru agama yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang tinggi dengan insentif finansial dan non-finansial yang tinggi serta ketersediaan program pelatihan berkelanjutan bagi guru agama untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi agama yang relevan dan menarik.	9	8	-	-	-	-	9	9	9	9	53
ACUAN REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN 2 BERDASARKAN TEORI WILLIAM N. DUNN											
<div>1. Efektivitas: Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas guru agama, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran agama. Skor: 9</div> <div>2. Efisiensi: Penyediaan insentif dan pelatihan tentu membutuhkan biaya. Efisiensi akan tergantung pada seberapa efektif program pelatihan dan seberapa besar peningkatan kompetensi guru yang dihasilkan. Skor: 8</div> <div>3. Kecukupan: Kebijakan ini secara langsung menjawab kebutuhan akan guru agama yang kompeten. Skor: 9</div> <div>4. Pemerataan: Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas guru agama secara keseluruhan. Namun, pemerataan akan tergantung pada mekanisme seleksi dan distribusi insentif. Skor: 9</div> <div>5. Responsivitas: Kebijakan ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan agama. Skor: 9</div> <div>6. Ketepatan: Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pendidikan agama yaitu mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Skor 9</div>											
SOLUSI PENYELESAIAN PROBLEM STATEMENT											
Secara keseluruhan, kebijakan Menteri Agama ini memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas.											
Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)										Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Kelayakan	Kelestarian	Keadilan	Kelayakan Politik	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	
ALTERNATIF 3											
Menteri Agama membuat regulasi tentang pengintegrasian nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat ke dalam kurikulum sebagai konteks pembelajaran agama bagi siswa untuk memperkuat akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa mengindahkan perkembangan global.	9	8	9	9	9	-	7	7	7	9	74
ACUAN REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN 3 BERDASARKAN TEORI WILLIAM N. DUNN											
<div>1. Efektivitas: Kebijakan ini berpotensi efektif dalam mencapai tujuannya, namun perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberhasilannya. Kebijakan ini dapat memperkuat karakter siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Skor: 9</div> <div>2. Efisiensi: Implementasi kebijakan ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia, sehingga perlu adanya pelatihan bagi guru dan penyediaan bahan ajar yang sesuai. Skor: 8</div> <div>3. Kelayakan: Kebijakan ini layak untuk diterapkan karena sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Pancasila, karena integrasi nilai-nilai lokal dan budaya dapat memperkuat identitas nasional. Skor: 9</div> <div>4. Kelestarian: Kebijakan ini sangat tepat dengan sumber masalah, yaitu melestarikan budaya lokal sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang diakumulasikan dalam materi pembelajaran agama. Skor: 9</div> <div>5. Keadilan: Kebijakan ini bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, karena kebijakan ini memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar tentang nilai-nilai lokal dan budaya. Skor: 9</div> <div>6. Kecukupan: Kebijakan merupakan langkah awal yang baik, namun perlu pengembangan lebih lanjut. Skor: 7</div> <div>7. Pemerataan: Potensi untuk merata, namun implementasi perlu diperhatikan. Skor: 7</div>											

8. Responsivitas: Kebijakan merespon sebagian kebutuhan, namun belum sepenuhnya. Skor: 7
9. Ketepatan: Kebijakan ini sangat tepat dengan masalah yang ingin diatasi, yaitu memperkuat akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa dalam konteks pembelajaran agama, karena kebijakan ini langsung menjawab tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan agama saat ini. Skor: 9
SOLUSI PENYELESAIAN PROBLEM STATEMENT
Kebijakan ini memiliki potensi yang besar untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan pemahaman siswa terhadap akar budaya mereka, dan memperkaya pengalaman belajar agama. Integrasi nilai-nilai lokal dapat memberikan relevansi yang lebih tinggi bagi siswa dalam memahami ajaran agama.

Berdasarkan tabel di atas, maka skoring kriteria alternatif kebijakan dalam *policy paper* ini adalah:

1. Menteri Agama membuat regulasi penguatan infrastruktur dan akses pendidikan agama melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan akses internet yang terjangkau dan subsidi transportasi bagi siswa dan guru. Berdasarkan kriteria alternatif kebijakannya, maka total skoringnya sebesar: **50** (lihat tabel alternatif 1).
2. Menteri Agama membuat regulasi penyelesaian guru agama yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang tinggi dengan insentif finansial dan non-finansial yang tinggi serta ketersediaan program pelatihan berkelanjutan bagi guru agama untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan materi agama yang relevan dan menarik. Berdasarkan kriteria alternatif kebijakannya, maka total skoringnya sebesar: **53** (lihat tabel alternatif 2).
3. Menteri Agama membuat regulasi tentang pengintegrasian nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat ke dalam kurikulum sebagai konteks pembelajaran agama bagi siswa untuk memperkuat akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa mengindahkan perkembangan global. Berdasarkan kriteria alternatif kebijakannya, maka total skoringnya sebesar: **74** (lihat tabel alternatif 3).

Dengan demikian, penulis memilih alternatif 3 di atas sebagai rekomendasi kebijakan dalam *policy paper* ini.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai tantangan, namun juga memiliki potensi yang besar. Beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Akses terbatas, kualitas tenaga pengajar yang kurang, sarana prasarana yang terbatas, kurikulum yang kurang relevan, dan pengaruh budaya luar merupakan tantangan utama dalam pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan.
2. Wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, nilai-nilai lokal yang kuat, dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan agama.
3. Beberapa kebijakan alternatif telah diusulkan, seperti penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan kemitraan, pemanfaatan teknologi, program beasiswa, pencegahan radikalisme, dan pengembangan wisata religi.

4. Pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
5. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
6. Pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan Kalimantan Utara merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan kualitas pendidikan agama di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Rekomendasi

Menteri Agama membuat regulasi tentang pengintegrasian nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat ke dalam kurikulum sebagai konteks pembelajaran agama bagi siswa untuk memperkuat akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa mengindahkan perkembangan global.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Arinanto, Setya dan N. Triyanti. 2009. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koespramoedyo, Deddy. 2003. *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2005. *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Partanto, P. A. dan M. D. Al-Barry. 1995. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Wignjodipoegoro, R.S. 1982. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2022-2024.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. *Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti* (edisi revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Roslina, Lia; Fani Heru W.; Wildan Lutfie; Kemal Hidayah; dan Tri Noor Aziza (2015). "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara". *Jurnal Borneo Administrator*, 11(3), 331-342.
- Sudiar, Sonny. 2013. *Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerja sama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara*. Surabaya: Pustaka Radja.

Sumarsono, Soni. 2012. *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Winarno, Budi. 2008. *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Skripsi/Tesis/Disertasi

J. J. J. Kalalo. 2018. *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Laporan Akhir Penyusunan Database Kesejahteraan Rakyat Pasca DOB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Website

T. D. Barlian, "Upaya Mengatasi Konflik Perbatasan Di Wilayah Indonesia," 2011. [Online]. Available: <https://triadarabarlian.wordpress.com/2011/06/11/upaya-mengatasi-konflik-perbatasan-di-wilayah-indonesia/>.